BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (P-RKPK) ACEH TENGGARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2020 penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang undang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor,33 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indoneisa tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawsa penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendoman pengelolalaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2106 tentang pendoman pengelolalaan keuangan daerah;
14. Peraturan meteri dalam negeri nomor 31 tahun 86 tahun 2017

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menegah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembagunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah;

15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2020 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun2020;
16. QanunKabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentangSusunanOrganisasidan Tata KerjaSatuanPerangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata laksana satuan kerja perangkat kabupaten aceh tenggara; (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 18);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana pembagunan jangka menengah kabupaten aceh tenggara ;
19. Qanun kabupaten aceh tenggara nomor 3 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah kabuaten (RPJMK) Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RK adalah DPRK Aceh Tenggara;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2017-2022;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2017-2022;

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disingkat dengan RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. RKPK Tahun 2020 adalah Perubahan rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh tenggara Tahun 2020.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

P-RKPK Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dalamjangkawaktu 1 (satu) tahun yang dimulaipadatanggal 1 Januari 2021dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal3

P-RKPK Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 yang berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal4

1) RKPK Tahun 2021disusun dengan sistematikapenyusunansebagaiberikut :
   BAB I : PENDAHULUAN
   BAB II :EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019
   BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
   BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   BAB VII : PENUTUP

2) Uraian secara rinci P-RKPK Tahun 2020 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

P-RKPK Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai :
1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum (KU) APBK, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK

2021 dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2021.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 36 TAHUN 2020.